

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Hidayatullah Sidik

715.4.1.1562

Perekonomian merupakan salah satu pekerjaan besar pemerintah pusat dan daerah untuk dikelola, dikembangkan dan diatur semaksimal mungkin agar ketertiban dalam kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan *Balance* sehingga hak masyarakat untuk hidup, maju dan berkembang dapat berjalan tanpa merugikan kegiatan masyarakat yang lainnya. Namun pada faktanya, dengan banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir Jalan Raya gapura bangkal kec. Kota Sumenep dan Jalan KH. Agus salim Pangarangan giling kec. Kota dinilai cukup mengganggu aktivitas pengendara yang melintasi jalan tersebut sehingga perlu adanya penegakan hukum atas problematika tempat pedagang kaki lima. Permasalahan yang terjadi Bagaimana Tinjauan Perda Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang penertiban umum terhadap pedagang kaki lima dan juga Bagaimana pemberian sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar perda sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang penertiban umum terhadap pedagang kaki lima (PKL). Tujuannya ialah Untuk mengkaji kepastian hukum terhadap kegiatan pedagang kaki lima yang terdapat di Kabupaten Sumenep dan Menganalisis ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kegiatan pedagang kaki lima yang terdapat di berbagai tempat di Kabupaten Sumenep.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatis dimana penelitian ini memberatkan kepada Perundang-undangan sebagai objek penelitian, untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan Perundang-undang, sumber bahan hukum ada dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisis Tinjauan Perda Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima, berdasarkan hasil Tinjauan terkait isi Perda tersebut tentang Ketertiban Umum mengenai Ketertiban, kebersihan dan Keindahan dinilai tidak lagi efektif digunakan untuk menata Pedagang Kaki Lima. Alasannya adalah bahwa Peraturan Daerah tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan realitas kondisi Pedagang Kaki Lima sekarang dan juga menganalisis Pemberian Sanksi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan daerah (Perda) Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), Peraturan Daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan

SatPol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum khususnya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah dan masyarakat diharapkan agar bekerja sama dalam hal Penertiban Pedagang Kaki Lima. Terkadang memang sebagian masyarakat terbantu dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan didekat area yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi untuk kepentingan bersama agar terjalin Lingkungan yang bersih, rapi, teratur, dan tidak mengganggu ketertiban umum, maka harus dilakukan Penertiban dan dibutuhkan Kerjasama antara Aparat Pemerintah dan Masyarakat sekitar.

Kata kunci: Hukum, Pedagang Kaki Lima, lingkungan



ABSTRACT

JURIDICIAL REVIEW ON THE INCOME OF THE FIVE TRADERS BY PAMONG PRAJA POLICE UNITS BY PERDA SUMENEP DISTRICT NUMBER 03 YEAR 2002 CONCERNING GENERAL RELATIONSHIP

**Hidayatullah Sidik
715.4.1.1562**

The economy is one of the major jobs of the central and regional governments to be managed, developed and regulated as much as possible so that order in economic activities can work with Balance so that the right of people to live, progress and develop can run without harming the activities of other communities. But in fact, with the number of street vendors who sell on the edge of the highway gate Bangkal kec. Sumenep City and KH. Agus Salim Pangarangan Milled Kec. The city is considered quite disturbing the activity of motorists who cross the road so that there is a need for law enforcement on the problematic places of street vendors. Problems that occur How to Review Laws of Sumenep Number 03 Year 2002 concerning public policing. Towards street vendors and also How to impose sanctions on street vendors who violate Perumen Sumenep Number 03 Year 2002 regarding public policing. (PKL. The aim is to examine the legal certainty of the activities of street vendors in Sumenep Regency and Analyze the provisions of the Regulations? Regions that regulate the activities of street vendors in various places In Sumenep Regency.

This thesis research uses Normative Juridical method where this research is burdensome to the legislation as the object of research, to approach the problem using the legislation approach, there are two sources of legal materials namely primary legal sources and secondary legal sources collected and processed using traceability techniques. library and interview materials were analyzed using qualitative methods.

The results of research conducted by the authors analyzed the Regional Regulation of Sumenep Number 03 Year 2002 regarding Public Order. Towards Street Vendors, based on the results of the Review related to the contents of the Regional Regulation concerning Public Order concerning Order, Cleanliness and Beauty are judged to be no longer effectively used to organize Traders Street vendor. The reason is that the Regional Regulation is no longer considered relevant to the reality of the current conditions of street vendors and also analyzes the granting of sanctions against street vendors who violate the regional regulation (Perda) Sumenep Number 03 of 2002 Regarding Public Order. PKL), a Regional Regulation can only be formed if there is a unity of opinion between the Regent Regional Head and the Regional People's Representative Council, including regarding the existence of the SatPol PP which basically has the role of assisting the Regent / Regional Head in organizing general government.

The Control of Street Vendors by the Government of Sumenep Regency has not been implemented properly as regulated in Regional Regulation No. 03/2002 concerning Public Order, especially the Arrangement and Development of Street Vendors. The government and the community are expected to cooperate in the matter of controlling street vendors. Sometimes it is true that some people are helped by the street vendors who sell near areas that are not allowed. However, for the common interest to establish a clean, neat, orderly environment that does not disturb public order, order must be carried out and Cooperation between Government Officials and the surrounding Community is needed.

Keywords: Law, Street Vendors, environment

